



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Padang 25112, Telp. (0751) 31401–31402–34425
Fax. (0751) 34671, www.sumbarprov.go.id. e-mail: biro_umum@sumbarprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sebagai Acuan Untuk Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

PROGRAM (4.00.01.01.01.222) PROGRAM PENGELOLAAN OTONOMI DAERAH

KEGIATAN (4.00.01.01.01.222.027) PEMBINAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

PEKERJAAN	:	SEWA SARANA MOBILITAS DARAT
LOKASI	:	BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT
PAGU DANA	:	Rp. 352.185.000,- (TIGA RATUS LIMA PULUH DUA RIBU SERATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU SRUPIAH)
HPS	:	Rp. 327.000.000,- (TIGA RATUS DUA PULUH TUJUH JUTA RUPIAH)
WAKTU PELAKSANAAN	:	TANGGAL 20 S.D 22 FEBRUARI 2019

I. UMUM

Nama Kegiatan	: Pembinaan Urusan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Pekerjaan	: Sewa Sarana Mobilitas Darat Dalam Rangka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)
Lokasi	: Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat
Nilai Pagu	: Rp. 352.185.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
Nilai HPS	: Rp. 327.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)
Sumber Dana	: APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019

II. LATAR BELAKANG

Penerapan Otonomi Daerah telah berjalan 17 tahun, banyak yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya, mendekatkan dan melaksanakan pelayanan publik yang lebih baik. Untuk menerapkan dan mendukung berbagai kebijakan itu, dana yang didistribusikan ke Daerah setiap tahun terus meningkat baik melalui DAU, DAK maupun dana lainnya. Bahkan tahun 2018 dana transfer dari Pusat telah mencapai Rp. 800 triliun. Kontribusi yang semakin besar itu telah mampu meningkatkan pelayanan publik, walaupun belum cukup memuaskan.

Di bidang ekonomi, khususnya dari angka pertumbuhan ekonomi di Daerah, juga telah mengalami peningkatan dan perubahan ke arah lebih baik. Bahkan telah banyak Pemerintah Daerah yang melakukan kerjasama antar Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan, seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Daerah lainnya.

Secara realistis ekonomi Daerah sudah cukup berkembang, walaupun jika dilihat dari data nasional kontribusi ekonomi Daerah terhadap ekspor belum meningkat secara signifikan. Ini tercermin dari jenis dan jumlah produk yang di ekspor dari masing-masing Daerah. Di sisi lain, justru impor terus meningkat baik untuk kebutuhan pangan pokok maupun bahan baku kebutuhan industri. Dari Indikator pertumbuhan sektoral pun, sektor yang justru menyerap tenaga kerja yaitu pertanian, manufaktur dan pertambangan masih tumbuh rendah. Padahal keunggulan produk atau daya saing Indonesia justru berada pada sektor tersebut.

Kondisi ini menyebabkan transaksi berjalan terus mengalami defisit, yang berakibat pada melemahnya nilai tukar, dan kenaikan harga yang terus melonjak. Ini akan berakibat pada penurunan daya beli, meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, yang pada akhirnya Indonesia tergiring masuk pada *middle income trap*. Padahal lembaga internasional dan Bappenas pernah memprediksi Indonesia akan menjadi negara nomor empat terbesar tahun 2030 dilihat dari *Gross Domestic Product* dan pendapatan per kapita.

Oleh karena itu diperlukan strategi Daerah dalam memperbaiki daya saing daerah melalui peningkatan dan perluasan produk-produk unggulan, termasuk produk komoditas ekspor. Sejalan dengan itu kerjasama perdagangan antar Daerah perlu terus digarap dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diselenggarakannya Rakernas APPSI Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya Program Kerja APPSI Tahun 2019 untuk mendorong kreatifitas dan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Mendorong berkembangnya kerjasama perdagangan produk unggulan antar daerah untuk penguatan ekonomi nasional.
3. Tersusunnya masukan kepada Pemerintah sebagai bahan dalam mengambil kebijakan yang diperlukan dibidang pemerintahan dan pembangunan daerah.

IV. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA

Pengguna jasa adalah Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat

V. LINGKUP PEKERJAAN

1. SEWA SARANA MOBILITAS DARAT UNTUK :

- Gubernur Seluruh Indonesia
- Menteri dan Narasumber
- Dewan Pakar APPSI
- Pejabat Pendamping Gubernur Seluruh Indonesia

2. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diperkirakan selama 3 (tiga) hari terhitung tanggal 20 s/d 22 Februari 2018.

3. SPESIFIKASI TEKNIS :

a. Jenis Kendaraan :

- ✓ Fortuner/Pajero
- ✓ Inova Reborn

b. Warna Kendaraan : Hitam

c. Tahun Pembuatan : Minimal 2016

d. Mempunyai Asuransi Kendaraan dan Sopir

e. Melengkapi Surat-surat kendaraan (STNK) (Scan) minimal 60% dari total semuanya dan foto Kendaraan.

f. Menyediakan Gaji Sopir, BBM Kendaraan dan Makan Sopir

g. Sopir harus memiliki SIM (Scan)

h. Surat Pernyataan bermaterai Rp.6000 :

- Bersedia dilakukan Klarifikasi dan Verifikasi Lapangan oleh Pokja terhadap jumlah Kendaraan yang ditawarkan.
- Mempunyai bengkel dan suku cadang (apabila terjadi kerusakan)
- Mempunyai Tenaga Mekanis sendiri (apabila terjadi kerusakan dijalan)
- Mempunyai Cadangan Kendaraan (apabila terjadi kerusakan dijalan)

4. **PERSYARATAN KUALIFIKASI :**

Memiliki Surat Izin sebagai berikut :

- a. Surat Izin Usaha (SIUP) / Izin Sewa/Rental Kendaraan
- b. Mempunyai Pengalaman dalam Bidang Usaha Sewa Kendaraan Tahun Terakhir

VI. PERSYARATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dalam pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan konstruksi harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis/ Rencana Kerja Syarat (RKS) yang terlampir pada Dokumen Lelang dan ketentuan lainnya akan diatur dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak).

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Januari 2019

Dibuat oleh

Disetujui Oleh

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN

KABAG OTONOMI DAERAH

Drs. IQBAL RAMADI PAYANA, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19680803 198809 1 001

NUZURWAN ERIXON,S.IP,M.Si
Pembina
Nip. 19720706 199203 1 002